

**Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan  
Tinjauan terhadap kebijakan di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)  
Bina Insan Batang Kuis**

**Irfa Walidi**

*e-mail:* [irfawaldinasution29@gmail.com](mailto:irfawaldinasution29@gmail.com)

**(Sekolah Tinggi Agama Islam Raudhatul Akmal)**

**Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui realisasi pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di SDIT Bina Insan Batang Kuis. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner, dokumentasi, dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDIT Bina Insan Batang Kuis mulai diterima pada tahun kedua setelah sekolah beroperasi. Laporan pertanggungjawaban dilaksanakan setelah menerima dana BOS selama dua tahun.*

**Kata Kunci:** keuangan pendidikan, SDIT

**Pendahuluan**

Rasulullah SAW. bersabda *kullukum raa'in wakullukum masuulun 'an ra'iyatih* artinya setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin pasti mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dalam hadis lain ada disebutkan *maa min 'abd yastar'uib Allah ra'iyah yamutu yauma yamut wahuwa ghasy lira'iyatih illa harrama Allah 'alaih al jannah*. Artinya pemimpin yang meninggal dunia sedang dia dalam keadaan sedang menipu yang dipimpinnya, maka haramlah baginya surga.

Lembaga pendidikan merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam hal mencerdaskan bangsa. Pendidikan dipandang sebagai suatu sarana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang peduli akan pendidikan dan dapat tergambarkan dari pencapaian pendidikan warga negaranya. Pencapaian pendidikan suatu bangsa dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan keterlaksanaan pendidikan. Di Indonesia, menurut pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Adapun fungsi nasional pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu hal yang tidak dapat dilupakan dalam mencapai tujuan pendidikan suatu bangsa adalah peran

negara dalam menyediakan sarana pendidikan. Menurut Dwi Siswoyo, dkk<sup>1</sup> lingkungan dan sarana pendidikan merupakan sumber yang dapat menentukan kualitas serta berlangsungnya usaha pendidikan. Lingkungan tersebut dapat bersifat lingkungan fisik, sosial dan budaya yang semuanya memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap usaha pendidikan. Belum memadainya tempat pendidikan (gedung sekolah, sarana olahraga dan rekreasi), perlengkapan, alat pendidikan, materi pendidikan, kurangnya kerjasama antara berbagai lembaga dalam masyarakat, rendahnya pendidikan penduduk serta biaya pendidikan yang relatif mahal pada umumnya dapat menghambat berlangsungnya pendidikan dengan baik.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Salah satu peran negara dalam hal tersebut adalah dengan memberikan atau meringankan biaya pendidikan di Indonesia. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjelaskan bahwa secara garis besar biaya pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.

Biaya pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pencapaian tujuan pendidikan. Biaya pendidikan inilah yang akan digunakan untuk membiayai seluruh pembiayaan pendidikan. Masalah pokok dalam pembiayaan pendidikan salah satunya adalah bagaimana mencukupi kebutuhan investasi, operasional dan personal sekolah serta bagaimana melindungi masyarakat khususnya masyarakat tidak mampu untuk memperjuangkan haknya mendapatkan pendidikan yang layak baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Upaya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatasi hal tersebut adalah memberikan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah-sekolah yang terdaftar. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan disebut dengan BOS Nasional. BOS mulai diterapkan sejak Juli 2005 dengan sasaran seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah yang pada dasarnya digunakan untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia agar dapat mengembangkan potensi dirinya sehingga dapat hidup mandiri dalam

---

<sup>1</sup> Dwi Siswoyo, dkk. (2013). *Ilmu Pendidikan* (Yogyakarta: UNY Press, 2013), H. 52.

masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tujuan umum BOS adalah mewujudkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu bagi semua lapisan masyarakat.

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah dihitung berdasarkan jumlah siswa per sekolah dikalikan satuan biaya BOS SD. Peranan BOS adalah memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu dengan mewajibkan sekolah memberikan keringanan/pengurangan biaya operasional sekolah kepada siswa. Dana BOS yang diterima akan diperhitungkan untuk meringankan beban semua siswa pada sekolah tersebut secara rata-rata.

Adapun penggunaan dana BOS menurut Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah atau personalia. Dana BOS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelian/penggunaan buku teks pelajaran, pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk pembelajaran, penggunaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian, pembelian peralatan tangan untuk keperluan pendidikan, pembelian bahan praktik atau bahan habis pakai, penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler, penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi.

Sebagai salah satu sekolah yang menerima pendanaan BOS, maka SDIT Bina Insan Batang Kuis harus melakukan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana BOS tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana BOS perlu dilaksanakan analisis pertanggungjawaban pengelolaan BOS di sekolah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDIT Bina Insan Batang Kuis.

### **Kajian Teori**

Secara khusus program BOS bertujuan untuk <sup>2</sup>:

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SDLB Negeri dan SMP/SMPLB/SD-SMP Satu Atap (SATAP)/SMPT Negeri terhadap biaya operasi sekolah.
2. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta
3. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik di sekolah swasta.

---

<sup>2</sup> Fitriani Elmizola, *Efektivitas Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Kegiatan Pembelajaran Di Smpn 1 Tanjungsamak Kec. Rangas Kabupaten Kepulauan Meranti*, Jurnal JOM FISIP Vol. 2 No. 2 - Oktober 2015, h. 3

### **Penelitian yang relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hani Fitria (2014) yang berjudul Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyimpulkan bahwa pengelolaan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menunjukkan hasil yang efektif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Erwantosi (2010) dengan judul Analisis Efektivitas, Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang dengan kesimpulan pengelolaan program BOS pada sekolah menengah pertama di Kota Padang belum efektif dilihat dari tujuan dan sasaran program yang belum sesuai dengan standar yang telah ditentukan, akuntabilitas pengelolaan BOS belum berjalan dengan baik dilihat dari pengusunan RAPBS dan penggunaan dana BOS tidak melibatkan guru dan komite sekolah sebagai alat kontrol, transparansi dalam pengelolaan dana BOS terlihat masih sangat lemah.

### **Hipotesis**

Dengan diadakannya observasi awal, maka hipotesis penelitian ini bahwa ada hal-hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan pertanggungjawaban.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Untuk mengumpulkan data primer dan sekunder peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

#### **1. Kuisisioner**

Kuisisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui.<sup>3</sup> Kuisisioner ini terdiri atas beberapa pernyataan yang dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan Dana BOS SDIT Bina Insan Batang Kuis yang ditinjau dari prinsip pengelolaan.

#### **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan dengan dokumen. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.<sup>4</sup> Penggunaan dokumen dalam penelitian ini untuk memperoleh data secara objektif

---

<sup>3</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 194.

<sup>4</sup> *Ibid.*, h 274

pengelolaan dana BOS SDIT Bina Insan Batang Kuis ditinjau dari segi pelaporan dan tertib administrasi.

### 3. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar penelitian kepada informan atau orang yang ahli di bidangnya. Wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data secara subyektif tentang pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh sekolah, keterlibatan orang tua siswa dalam partisipasi, dan transparansi pengelolaan dana BOS sekolah terhadap orang tua/wali murid.

## Hasil Penelitian

### Profil SDIT Bina Insan Batang Kuis

SDIT Bina Insan Batang Kuis berdiri tahun 2013 dikelola oleh yayasan Bina Insan Deli Serdang Sumut. Mulai beroperasi tahun pelajaran 2013-2014. Sekolah ini memiliki murid pertama kalinya hanya 10 orang pada tahun pelajaran 2013-2014. TP. 2014-2015 bertambah menjadi 49 orang siswa. Pada tahun 2015-2016 yang seharusnya masih sampai kelas tiga, namun karena ada beberapa siswa yang pindah ke kelas empat maka dibukalah kelasnya, pada tahun itu jumlah siswa secara keseluruhan bertambah menjadi 90 siswa. Pada tahun pelajaran 2016-2017 jumlah siswa menjadi 190 siswa. dan pada tahun pelajaran 2017-2018 jumlah siswa menjadi 264 orang. Tahun 2018 sekolah ini memiliki 11 rombongan belajar (rombel) yaitu kelas VI satu rombel, kelas V satu Rombel, kelas IV dua rombel, Kelas III dua rombel, kelas II tiga rombel, dan kelas I satu rombel .

Guru di sekolah ini pada tahun pertama beroperasi hanya tiga orang guru, dan dengan bertambahnya rombel, maka bertambah pula guru yang mengajar. Setiap kelas diajar oleh dua orang guru.

Kepala sekolah pada sekolah SDIT Bina Insan Batang Kuis hingga tahun 2018 sudah dijabat oleh tiga orang kepala sekolah yaitu Suntoro, S.Pd selama dua tahun (TP 2013-2014 sampai TP 2014-2015), Lismaria panjaitan, S.Pd.I selama satu tahun (TP 2015-2016), dan Andang Purwanto, S.Pd.I mulai TP 2016-2017 sampai sekarang.

Sekolah ini masuk dalam anggota Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) yang memiliki kurikulum khusus sehingga sekolah ini berbeda dengan sekolah lainnya yang tidak masuk dalam jaringan tersebut.

## **Realisasi pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di SDIT Bina Insan Batang Kuis**

SDIT Bina Insan Batang Kuis mulai mendapat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bukan dari awal beropersinya sekolah tersebut. Hal ini disebabkan oleh data pada aplikasi dapodik belum diisi dengan lengkap. Oleh karena itu, maka tidak ada pertanggungjawaban yang harus dilakukan.

Dana Bos mulai diterima pada tahun pelajaran 2015-2016 semester satu yang pada tahun anggarannya yaitu triwulan tiga (Juli, Agustus, dan September) tahun anggaran 2015. Ada terjadi perbedaan antara tahun pelajaran dengan tahun anggaran. Tahun pelajaran dimulai pada bulan Juli setiap tahunnya sedangkan tahun anggaran dimulai pada bulan Januari setiap tahunnya. Dana BOS triwulan tiga ini belum diterima sampai akhir bulan september. Oleh karena itu maka, pada awal triwulan empat belum membuat laporan pertanggungjawaban. Dana BOS Triwulan Tiga ini bersamaan diterima dengan anggaran triwulan empat yaitu pada bulan desember akhir.<sup>5</sup> Oleh karena itu, seharusnya laporan pertanggungjawaban harus dilakukan pada bulan Januari tahun 2016, namun tidak dilaporkan karena mekanisme yang harus dilaksanakan sangat rumit bagi kepala sekolah, hal ini terjadi karena baru pertama kali menerima dana BOS. Setelah satu tahun menerima dana BOS atau selama empat triwulan menerima dana BOS, kepala sekolah belum pernah melakukan laporan pertanggungjawaban tentang dana yang diterima. Setelah lima kali menerima dana BOS, baru dibuat laporan pertanggungjawabannya. Pada waktu itu semua dana yang sudah diterima sekali gus dilaporkan, namun dalam jilid yang berbeda setiap triwulannya.<sup>6</sup> Selanjutnya laporan tersebut harus *dionlinekan*.<sup>7</sup>

Laporan pertanggungjawaban diserahkan kepada Kepala dinas pendidikan kecamatan dan ke dinas pendidikan kabupaten.

Hambatan membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS

1. Dana BOS tidak sekali gus masuk ke rekening
2. Dana BOS Masuknya ke rekening Sekolah pada akhir triwulan yang sedang dijalani
3. Dana BOS tidak seutuhnya ditangani oleh kepala sekolah, namun ada keikutsertaan pihak yayasan

Solusi yang dilaksanakan dalam menanggulangi hambatan yang terjadi

1. Dibuat atas nama hutang sesuai dengan dana yang akan diterima
2. Sesering mungkin dilakukan komunikasi dengan pihak yayasan

---

<sup>5</sup> Sesuai dengan rekening dana BOS Sekolah

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan kepala sekolah Andang Purwanto, S.Pd.I

<sup>7</sup> Sesuai dengan data laporan online dana BOS SDIT Bina Insan Batang Kuis

## **Kesimpulan**

Disimpulkan bahwa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima oleh SDIT Bina insan batang Kuis tidak dari awal beroperasinya sekolah ini, namun pada tahun ajaran kedua baru mendapat dana bantuan tersebut. Triwulan yang pertama sekali diterima yaitu anggaran triwulan ke tiga tahun anggaran 2015 dan diterima pada akhir triwulan ke empat tahun anggaran 2015. Laporan pertanggungjawaban dana tersebut dilaksanakan setelah menerima dana BOS selama empat triwulan. Laporan pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan print out dan online. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan diperdapat bahwa laporan pertanggungjawab dana BOS SDIT Bina Insan merupakan laporan yang tidak bermasalah.

Disarankan kepada pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah agar melaporkan dana tersebut sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pemerintah, baik secara manual (Print out) maupun secara online.

## **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. (2010) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Elmizola Fitriani, (2015) *Efektivitas Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Pada Kegiatan Pembelajaran Di Smpn 1 Tanjungsamak Kec. Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti*, Jurnal JOM FISIP Vol. 2 No. 2
- Erwantosi (2010) *Analisis Efektivitas, Akuntabilitas dan Transparansi Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Menengah Pertama di Kota Padang*
- Hani Fitria (2014) *Efektivitas Pengelolaan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)*
- Siswoyo, Dwi, dkk. (2013). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.